

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di era reformasi ini pemerintahan yang ada di setiap negara baik itu negara berkembang ataupun negara maju pastilah dituntut untuk dapat menunjukkan kualitas yang semakin membaik tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan bahwa setiap negara membutuhkan adanya pemerintahan yang baik dan mampu mengemban tugas negara. Dalam hal ini ditekankan pada pemerintahan yang menuju pada *corporate governance*. Dalam perkembangan dunia yang sangat pesat ini di setiap negara, termasuk Indonesia sangat memperhatikan hal tersebut karena akan menunjukkan bagaimana suatu negara tersebut dengan adanya pemerintahan yang baik (Megawati,dkk 2015). Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh rakyat. *Good government governance* tercermin dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah (Silviana,2014).

Menurut Erlina dan Rasdianto dalam Aniftahudin (2016), Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi - transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakaian dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik serta Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berperan penting pada organisasi pemerintah.

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan ditentukan dari kompetensi sumber daya manusia tersebut. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Kadek & Nyoman, 2014). Oleh karena itu, dalam organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan SDM yang kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kualitas laporan keuangan dapat diperkuat juga dari opini BPK. Kualitas terbaik dari laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di dalam mencapai opini WTP, peran dari penerapan sistem akuntansi yang baik serta pemanfaatan teknologi yang mendukung dan sumber daya manusia yang kompeten sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Selain itu, proses penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, cepat, dan tentunya data yang dihasilkan harus akurat, maka di dalam hal ini diperlukan adanya dukungan sistem akuntansi dan teknologi. Data opini BPK dari seluruh Provinsi di Indonesia yang mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan pengecualian (WDP) yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data Opini Audit 34 Daerah

No	Nama Daerah	Opini Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
1	Aceh	Wajar tanpa Pengecualian
2	Sumatera Utara	Wajar Tanpa Pengecualian
3	Sumatera Barat	Wajar Tanpa Pengecualian
4	Riau	Wajar Tanpa Pengecualian
5	Jambi	Wajar Tanpa Pengecualian
6	Sumatera Selatan	Wajar Tanpa Pengecualian
7	Bengkulu	Wajar Dengan Pengecualian
8	Lampung	Wajar Tanpa Pengecualian
9	Kepulauan Bangka	Wajar Dengan Pengecualian

	Belitung	
10	Keepulauan Riau	Wajar Tanpa Pengecualian
11	DKI Jakarta	Wajar Dengan Pengecualian
12	Jawa Barat	Wajar Tanpa Pengecualian
13	Jawa Tengah	Wajar Tanpa Pengecualian
14	D.I. Yogyakarta	Wajar Tanpa Pengecualian
15	Jawa Timur	Wajar Tanpa Pengecualian
16	Banten	Wajar Tanpa Pengecualian
17	Bali	Wajar Tanpa Pengecualian
18	Nusa Tenggara Barat	Wajar Tanpa Pengecualian
19	Nusa Tenggara Timur	Wajar Tanpa Pengecualian
20	Kalimantan Barat	Wajar Tanpa Pengecualian
21	Kalimantan Tengah	Wajar Tanpa Pengecualian
22	Kalimantan Selatan	Wajar Tanpa Pengecualian
23	Kalimantan Timur	Wajar Tanpa Pengecualian
24	Kalimantan Utara	Wajar Tanpa Pengecualian
25	Sulawesi Utara	Wajar Tanpa Pengecualian
26	Sulawesi Tengah	Wajar Tanpa Pengecualian
27	Sulawesi Selatan	Wajar Tanpa Pengecualian
28	Sulawesi Tenggara	Wajar Tanpa Pengecualian
29	Gorontalo	Wajar Tanpa Pengecualian
30	Sulawesi Barat	Wajar Tanpa Pengecualian
31	Maluku	Wajar Tanpa Pengecualian
32	Maluku Utara	Wajar Tanpa Pengecualian
33	Papua	Wajar Tanpa Pengecualian
34	Papua Barat	Wajar Tanpa Pengecualian

Berita yang dimuat oleh M. Iqbal Ichsan dalam Tempo.co pada tanggal 31 Mei 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016. Ada beberapa hal yang dicatat BPK yang dinilai bermasalah, yaitu sistem informasi aset belum mendukung pencatatan aset sesuai dengan standar akuntansi, inventarisasi aset belum selesai, serta data kartu inventaris barang tidak informatif dan tidak valid. Selain itu, BPK menemukan masih ada penyusutan aset yang tidak didukung kertas kerja penyusutan. Pemerintah Provinsi DKI juga mencatat aset tanah yang sama, tapi dicatat pada tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berbeda. Ada pula yang dicatat pada dua SKPD berbeda. Laporan lain, BPK menemukan ada aset yang dicatat tanpa informasi lokasi dan sertifikat tanah. Kemudian, aset peralatan dan mesin tidak didukung data rincian. Aset gedung dan bangunan serta aset jalan irigasi dan jaringan masih dinilai Rp 0, Rp 1, Rp 1.000, dan minus. Aset tetap pada Dinas Pendidikan tidak didukung data rincian. Dengan

begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan opini wajar dengan pengecualian sebanyak empat kali berturut-turut.

Berdasarkan fenomena dalam penerapan sistem informasi sangatlah jelas bahwa sistem yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, belum sesuai dengan standarisasi akuntansi yang berlaku, maka hal tersebut dapat menyebabkan informasi akuntansi tersebut tidak relevan, tidak memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), tidak memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tidak lengkap, tidak andal, tidak dengan penyajian jujur, tidak dapat diverifikasi (*verifiability*), tidak dapat di netralitas, tidak dapat dibandingkan, dan tidak dapat dipahami. Dari fenomena tersebut penerapan sistem yang dilakukan oleh DKI Jakarta masih sangat kurang dikarenakan belum adanya penerapan standar akuntansi yang sesuai.

Beberapa penelitian terkait kualitas informasi akuntansi telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, dkk (2014) yang menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi pemerintah daerah, hal ini dikarenakan suatu instansi memiliki peran penting dalam menjamin tersedianya laporan keuangan daerah yang valid. Yang berarti bahwa keberhasilan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah tergantung pada penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan. Didalam hasil penelitian Rahayu, dkk (2014) juga didukung penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Salehi (2010), Aniftahudi (2016), dan Wati, dkk (2014). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati & Istihika (2014) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rohanti, dkk (2014) menyuji pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi mendapatkan hasil berpengaruh signifikan, hasil ini dikarenakan SKPD Kabupaten Buleleng sudah baik. Yang terlihat dari jumlah komputer yang cukup memadai, terpasang jaringan internet yang memudahkan pegawai dalam akses dan transfer data, kemudian proses penyusunan laporan keuangan di setiap SKPD sudah dibantu

dengan suatu aplikasi akuntansi yang bernama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Semua kemudahan dan pemanfaatan teknologi yang maksimal akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh Rohanti, dkk (2014) didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Anithahudin, (2016) , Raja, (2017) yang mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Desmiyanti, (2014) dan Salehi, (2010) hasil yang didapat bertolak belakang dari penelitian sebelumnya yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi. Dikarenakan teknologi informasi tidak dimanfaatkan dengan baik maka hasil informasi akuntansi yang dikeluarkan tidak memiliki kualitas yang baik.

Dan penelitian lain yang dilakukan oleh Rahayu, dkk (2014) yang menguji kompetensi sumber daya manusia mendapat hasil berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitas yang dimiliki yaitu kemampuan seseorang atau individu , suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Jika kompetensi sumber daya manusia tidak sesuai dengan pendidikan diluar akuntansi, maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga, kualitas laporan tersebut menjadi tidak akurat karena tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2010), Setyowati & Isthika (2014), Rohanti, dkk (2014), Wati, dkk (2014), dan Megawati, dkk (2015). Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Afrida (2016) tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi keuangan daerah, disebabkan kerena kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki kompetensi yang sesuai maka hasil informasi yang dihasilkan kurang baik .

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta belum mendukung sistem informasi pencatatan asset sesuai dengan standar akuntansi, inventarisasi asset belum selesai, serta data kartu inventaris barang tidak informatif dan tidak valid.

Dikarenakan masih terdapat hasil yang beragam dari penelitian terdahulu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. Penelitian ini mereplikasi pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aniftahudin (2016). Namun terdapat perbedaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti dengan adanya pengaruh pemahaman akuntansi, sistem akuntansi keuangan daerah, dan teknologi informasi, perbedaan lain juga terdapat pada objek penelitian yang berada di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian dan pengujian kembali "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah".

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas sebahagai berikut:

- a. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi ?
- b. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi ?
- c. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, adapun tujuannya antara lain :

- a. Untuk menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi terhadap kualitas informasi akuntansi.
- b. Untuk menguji pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi akuntansi.
- c. Untuk menguji kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi akuntansi.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kualitas Informasi Akuntansi yang diuji baik secara simultan maupun parsial.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dan menambah referensi dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik khususnya tentang transparansi pelaporan keuangan.

2) Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah serta dapat membantu peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian tentang transparansi pelaporan keuangan.

3) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, koreksi dan untuk perbaikan didalam implementasi pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah daerah atau SKPD.

4) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menilai transparansi pelaporan keuangan.